

**PERAN PERPUSTAKAAN DESA DALAM PROGRAM LITERASI  
BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI DESA KARANGANYAR  
KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS**

**Melinda Putri**<sup>1\*</sup>, Endah Vestikowati<sup>2</sup>, Regi Refian Garis<sup>3</sup>, Neti Sunarti<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

\*Korespondensi : regirefiangaris@gmail.com

**ABSTRAK**

Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan desa yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan agar terciptanya masyarakat sejahtera. Ditemukan beberapa indikator permasalahan terkait hal ini di perpustakaan Desa Karanganyar yaitu belum adanya aturan tentang pelayanan perpustakaan desa, kurangnya efektifnya pelayanan perpustakaan desa dikarenakan petugas perpustakaan yang merangkap jabatan sebagai perangkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perpustakaan desa dalam program literasi berbasis inklusi sosial di Desa Karanganyar melalui tiga peran utama sektor publik yaitu regulatory role, enabling role dan direct provision of goods and service. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perpustakaan desa dalam program literasi berbasis inklusi sosial di Desa Karanganyar sudah dilakukan dengan cukup baik, namun masih terdapat kendala yaitu belum adanya aturan tentang pelayanan perpustakaan desa, merangkap jabatannya petugas perpustakaan menjadi perangkat desa, dan kurangnya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Peran perpustakaan desa yang sudah dilakukan yaitu petugas perpustakaan desa bersama masyarakat sudah mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, terbukti bahwa sudah ada hasil dari potensi-potensi di tiap dusun di Desa Karanganyar dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan petugas perpustakaan desa.

**Kata Kunci :** Peran, Perpustakaan Desa, Inklusi Sosial

**ABSTRACT**

*Social inclusion-based village libraries are village libraries that facilitate the community in developing their potential by improving the quality of library services in order to create a prosperous society. Several indicators of problems related to this were found in the Karanganyar Village library, namely the absence of rules regarding village library services, the lack of effectiveness of village library services because the librarian held concurrent positions as village officials. This study aims to determine the role of the village library in a social inclusion-based literacy program in Karanganyar Village through the three main roles of the public sector, namely the regulatory role, enabling role and direct provision of goods and services. This study used a descriptive research method with a qualitative approach using data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation studies. The research results show that the*

*role of the village library in the social inclusion-based literacy program in Karanganyar Village has been carried out quite well, but there are still obstacles, namely the absence of regulations regarding village library services, the concurrent position of the librarian as a village apparatus, and the lack of good service to the community. . The role of the village library that has been carried out is that the village librarian together with the community has developed a social inclusion-based library that benefits the community, it is evident that there have been results from the potentials in each hamlet in Karanganyar Village from the guidance carried out by the village government and village librarians.*

**Keywords :** *Role, Village Library, Social Inclusion*

#### **A. PENDAHULUAN**

Perpustakaan desa merupakan lembaga layanan publik yang berada di desa. Sebuah unit yang dikembangkan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan warga yang berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan rekreasi kepada semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) Tentang Perpustakaan dijelaskan bahwa: "Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka".

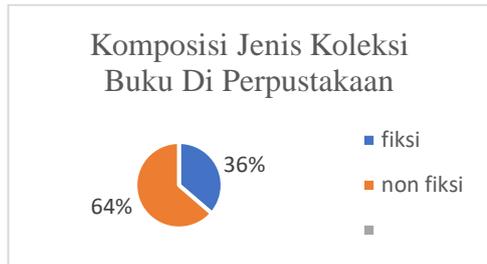
Transformasi yang digunakan dalam perpustakaan saat ini yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan menjadikan program penguatan literasi dan pengentasan kemiskinan. (Rachman, Dadang dan Rohanda, 2019: 907).

Perpustakaan Desa Karanganyar berdiri pada tahun 2014 yang diresmikan oleh kepala Desa Karanganyar, Bapak Yanto Agus Sonjaya, pada tanggal 11

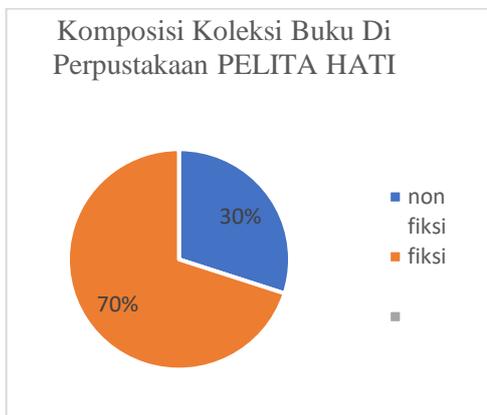
Oktober 2016. Dengan SK Pendirian Nomor 142/22/Kpts/X/e/2016. Perpustakaan Desa dikelola oleh pemerintah desa secara sederhana. Karena perkembangan perpustakaan pada tahun 2014 hingga pertengahan 2015 tidak mengalami banyak peningkatan, baru kemudian pada bulan Mei tahun 2015 pengelolaan perpustakaan desa diintensifkan walaupun pelaksanaan oleh Pemerintah desa masih secara sederhana.

Salah satu perpustakaan desa yang aktif di Kecamatan Cijeungjing adalah Perpustakaan PELITA HATI Desa Karanganyar. Perpustakaan ini dinobatkan sebagai perpustakaan terbaik di Kabupaten Ciamis tahun 2021 dan mengikutilomba perpustakaan desa tingkat Provinsi Jawa Barat dengan meraih juara ke-4, namun perpustakaan ini satu-satunya perpustakaan yang belum berbasis digital.

Dalam buku Pedoman penyelenggaraan Perpustakaan Desa (2011, 2022), dinyatakan bahwa Perpustakaan desa mempunyai koleksi awal sekurang-kurangnya 1000 judul (2500 eksemplar). Adapun komposisi jenis koleksi yang harus dimiliki perpustakaan desa adalah perbandingan non-fiksi 60% dan fiksi 40%.



Dengan persentase non-fiksi, lebih besar, dimaksudkan agar masyarakat pengguna perpustakaan dapat memperluas pengetahuan umum dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari.



Sumber: diolah dari perpustakaan Desa Karanganyar, 2021

Berdasarkan grafik diatas perpustakaan Desa Karanganyar memiliki 1.500 judul buku cetak dengan komposisi jenis koleksi buku perbandingan 30% non fiksi dan 70% fiksi. Hal ini belum sesuai dengan buku pedoman penyelenggaraan perpustakaan desa bahwa komposisi jenis koleksi buku yang harus dimiliki oleh perpustakaan desa adalah perbandingan non-fiksi 60% dan fiksi 40%.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keberagaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan berusaha,

melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia. (<https://www.perpustnas.go.id/newsdetail.php?lang=id&id=21032305523rsSk35Qu>,di akses 05 November 2021).

Dalam kegiatan Sosialisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional, disebutkan bahwa perpustakaan umum berbasis inklusi sosial di sini selain menyelenggarakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi, maka perpustakaan juga harus memfasilitasi masyarakat dengan berbagai pelatihan dan keterampilan dengan tujuan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat(Darmawan,2019).

Namun berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa terdapat permasalahan yang dihadapi Perpustakaan PELITA HATI di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dimana belum sepenuhnya berperan secara optimal dalam program literasi berbasis inklusi sosial.Terdapat beberapa indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Belum adanya aturan tentang pelayanan perpustakaan desa. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan pasal 14 ayat (2) bahwa setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
2. Petugas perpustakaan dalam melaksanakan program perpustakaan belum mampu untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Kurangnya kreativitas pengelola perpustakaan desa dalam

membuat inovasi dan kreasi untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca bagi masyarakat desa. Kurangnya sosialisasi dari petugas perpustakaan desa kepada masyarakat.

3. Kurang efektifnya pelayanan perpustakaan desa dikarenakan petugas perpustakaan merangkap jabatan sebagai perangkat desa.

Maka, berdasarkan permasalahan yang ada menjadi alasan penting bagi peneliti untuk mengetahui peran perpustakaan desa dalam program literasi berbasis inklusi sosial dengan mengukur peran menggunakan teori menurut Jones dalam Mahsun (2013), peran utama sektor publik terbagi menjadi tiga peran yaitu: *regulatory role*, *enabling role*, dan *direct provision of goods dan service*.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Satori (2011:23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena penelitian ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat diuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam teknik pengumpulan data, yakni peneliti melakukan wawancara dengan bertanya langsung kepada narasumber menggunakan pedoman wawancara namun dapat berkembang dari pertanyaan tersebut. Selain itu observasi adalah metode pengumpulan data yang

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan atau penginderaan (Bungin 2011:118), dan studi dokumentasi yaitu dengan peneliti memperoleh bahan-bahan dari buku, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan fokus penelitian penulis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Perpustakaan Desa Karanganyar



Gambar 1.1 Perpustakaan Desa PELITA HATI Desa Karanganyar

Berdirinya Perpustakaan Desa Karanganyar pada tahun 2014 dan diresmikan oleh Kepala Desa Karanganyar, oleh Bapak Yanto Agus Sonjaya pada tanggal 11 Oktober 2016. Karena perkembangan perpustakaan pada tahun 2014 hingga pertengahan 2015 dirasa tidak mengalami banyak peningkatan, baru kemudian pada bulan mei 2015 pengelolaan perpustakaan diintensifkan walaupun pelaksanaannya masih oleh pemerintah desa dan dikelola secara sederhana.

Perpustakaan Desa Karanganyar yang diberi nama perpustakaan PELITA HATI sampai saat ini belum memiliki bangunan sendiri ataupun bangunan secara terpisah melainkan masih menggunakan ruang bangunan pemerintah desa.

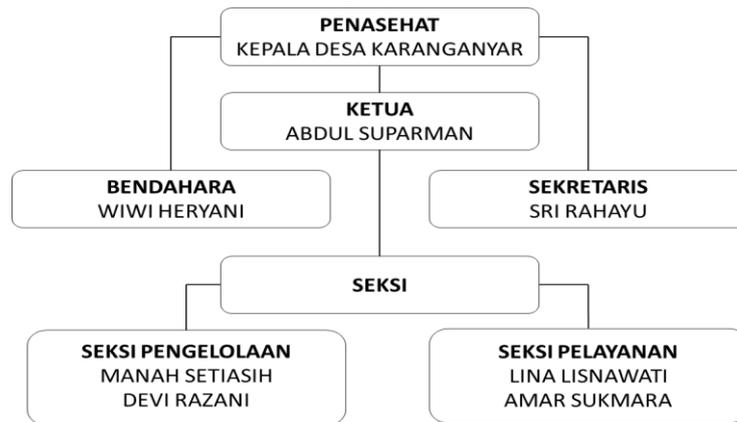
Petugas perpustakaan di Desa Karanganyar menunjukkan bahwa petugas yang dominan adalah berjenis kelamin

perempuan dengan jumlah 5 orang dan laki-laki 2 orang.

Dengan latar belakang pendidikan SLTA yang lebih dominan yang berjumlah 6 orang dan S1 hanya satu orang. Untuk menutupi kekurangan tersebut

perpustakaan desa memberikan kesempatan kepada pengelola untuk mengikuti diklat-diklat perpustakaan, seminar/workshop di bidang kepastakawanan.

**Gambar 1.2 Struktur organisasi Perpustakaan desa Pelita Hati Desa Karanganyar**



Sumber: Perpustakaan Desa Karanganyar

NO	Pendidikan	Jumlah	%
1	SLTA	6	85,71
2	S1	1	14,29
Jumlah		7	100.00

Sumber: perpustakaan desa PELITA HATI Desa Karanganyar

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran perpustakaan desa dalam program literasi berbasis inklusi sosial di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis baik itu pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana penelitian ini akan dijelaskan dengan melihat kriteria peran menurut Jones dalam Mahsun antara lain sebagai berikut:

*1. Regulatory Role*

Peran sektor publik dalam menjamin terlaksananya peraturan yang sudah di tetapkan , *regulatory role* juga salah satu dimensi dalam organisasi sektor publik yang berperan untuk menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat.

Di perpustakaan desa PELITA HATI belum memiliki aturan khusus tentang pelayanan perpustakaan, masih berpacu pada aturan perpustakaan desa. Dan petugas perpustakaan desa disusun berdasarkan SK pendirian perpustakaan Nomor: 141/22/Kpts/X/2016, namun pada pelaksanaannya masih tumpang tindih karena ada petugas perpustakaan yang merangkap jabatan sebagai perangkat desa, dan selebihnya ada unsur masyarakat yang

tidak memiliki unsur pekerjaan namun tidak melakukan pembagian shif kerja dalam pelayanan di perpustakaan desa.

## 2. *Enabling Role*

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa petugas perpustakaan desa belum memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, jarang adanya petugas yang berjaga saat jam buka, belum melakukan sosialisasi atau promosi terkait pentingnya berliterasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada kontak person yang dicantumkan di perpustakaan desa untuk memudahkan masyarakat saat ingin berliterasi atau meminjam buku ketika tidak ada petugas perpustakaan yang berjaga, hal ini menjadi salah satu hambatan belum maksimalnya pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan desa.

## 3. *Direct Provision of Goods and Service*

Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa petugas perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, terbukti sudah melakukan literasi zonasi potensi di 5 dusun dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan.

Namun terdapat permasalahan pada perpustakaan desa dimana pojok baca masih kurang, belum berbasis digital,

belum memiliki bangunan perpustakaan khusus terpisah.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa peran yang dilakukan perpustakaan desa dalam program literasi berbasis inklusi sosial belum berjalan dengan baik sesuai dengan tiga peran utama organisasi sektor publik yang dikemukakan oleh Jones dalam Mahsun (2013:8) yaitu *regulatory role*, *enabling role* dan *direct provision of goods and service*. Dimana dari 3 dimensi tersebut masih mengalami kendala atau hambatan. Dengan demikian, peran perpustakaan desa dalam program literasi berbasis inklusi sosial masih belum optimal.

Belum adanya aturan khusus dari pemerintah desa kepada petugas perpustakaan berpengaruh terhadap pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan desa yaitu belum menjalankannya tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tidak adanya petugas perpustakaan yang jaga atau tidak adanya pembagian shif saat jam buka perpustakaan desa perpustakaan menjadi kosong saat masyarakat yang ingin meminjam buku atau sekedar membaca. Sehingga masyarakat menjadi enggan untuk ke perpustakaan karena tidak adanya pelayanan dari petugas perpustakaan desa.

Merangkap jabatannya petugas perpustakaan desa sebagai perangkat desa menjadikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang optimal. Kesibukannya dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa menjadikan tanggung jawab menjadi petugas

perpustakaan desa tidak terlaksana dengan baik. Kurangnya petugas yang profesional atau pegawai ahli di bidang perpustakaan sehingga mempengaruhi kepada kualitas kerja petugas perpustakaan.

Meskipun Perpustakaan desa PELITA HATI desa Karanganyar dinobatkan sebagai perpustakaan terbaik di Kabupaten Ciamis tahun 2021 dan mengikuti lomba perpustakaan desa tingkat provinsi Jawa Barat dengan meraih Juara ke 4. Perpustakaan PELITA HATI satu-satunya perpustakaan yang masuk nominasi juara tingkat provinsi yang belum berbasis digital namun satu-satunya perpustakaan yang sudah melakukan literasi zonasi potensi tiap dusun yang ada di desa. Belum menjamin berjalannya perpustakaan desa dalam program literasi berbasis inklusi sosial.

Untuk menjadikan perpustakaan desa Pelita Hati berbasis inklusi sosial ini sudah berjalan bahwa di 5 dusun ini terbukti sudah dilakukannya upaya untuk pendampingan kepada masyarakat dengan mengembangkan potensi-potensinya di tiap dusun, namun belum adanya upaya untuk mengajak masyarakat berliterasi ke perpustakaan desa sesuai dengan zonasi potensi diberbagai dusun yang ada di Desa Karanganyar. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dibuatnya aturan khusus atau SOP tentang pelayanan perpustakaan desa diperlukan untuk menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan tugas fungsinya masing-masing.
2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan minat baca masyarakat, sebaiknya perpustakaan desa Pelita Hati melakukan pelatihan-pelatihan terkait

pengelolaan perpustakaan desa kepada seluruh petugas perpustakaan desa dan mengadakan sosialisasi dan mempromosikan perpustakaan desa kepada masyarakat. Tidak hanya melakukan pembinaan kepada masyarakat, namun juga harus mensosialisasikan pentingnya berliterasi dan giat membaca ke perpustakaan desa.

3. Melakukan evaluasi dan pengarahan yang baik kepada petugas perpustakaan agar petugas perpustakaan desa lebih mengerti tugas, peran dan fungsinya masing-masing di setiap bidang atau jabatan. Dalam pembagian kerja sebaiknya jangan merangkap jabatan karena kurang maksimalnya dalam pelayanan di perpustakaan desa.
4. Adanya insentif bagi peugas perpustakaan untuk meningkatkan kualitas kerja petugas perpustakaan supaya lebih giat dan lebih bertanggung jawab lagi dalam melakukan tugasnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
5. Jika potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin melalui kearifan lokal yang ada di desa dengan dukungan semua pihak, dapat dipastikan tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara cepat, tepat dan efisien.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulsyani.2016.*Sosiologi (skema, teori dan terapan)*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- DAKSA Foundation. 2013. *Pengertian Inklusi*.

- <https://daksablog.wordpress.com/2013/05/10/pengertian-inklusi/amp/>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2021
- Darmawan, H. 2019. *Sosialisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*. Retrieved from <https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=1903280650531IwHcN3x98C> diakses pada tanggal 18 Desember 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Rachman, Rani Auliawati., Sugiana, Dadang dan Rohanda H. 2019. "Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera (Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang)" Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran 2019 "*Communication and Information Beyond Boundaries*" dalam <https://www.researchgate.net/>, diakses 15 November 2021.
- Satori Djam'an, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung,. Alfabeta.
- Titi Haryanti, Woro (2019). *Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Cerdaskan Masyarakat*. Diakses tanggal 22 Desember 2021
- Utami, D., & Prasteyo, W.D. (2020). Transformasi perpustakaan dalam rangka mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif: Studi kasus di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau. *Visi Pusaka: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan*, 22(1), 39-46.
- Undang-Undang N0. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan
- Wijayanti, Luki. 2019. *Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan Khusus Dalam Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*. Disampaikan pada diskusi panel perpustakaan khusus, Rapat Koordinasi Nasional Perpusutakaan Tahun 2019, Tanggal 15 Maret 2019: Jakarta. <https://economy.okezone.com/read/2018/07/18/320/1923967/bappenas-matangkan-konsep-pembangunan-ekonomi-inklusif-apa-itu> diakses pada tanggal 10 November 2021.